

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kerja Sama Indonesia dan Singapura telah lama terjalin dan kedua Negara juga sangat intens mengontrol dan terus memperkuat hubungan diantara keduanya. Tak terkecuali Kerja Sama dalam bidang Ekonomi yang sudah pasti menjadi kerja sama yang sangat potensial mengingat regional kedua Negara ini sangat ideal seolah berada di persimpangan sebuah pasar yang menjadi salah satu yang tersibuk di dunia. Dengan situasi seperti ini tentu kedua Negara tidak menyia-nyiaakan kesempatan untuk memanfaatkan keuntungan geografis ini dan membuat berbagai kebijakan maupun perjanjian yang juga menguntungkan keduanya. Salah satunya *Free Trade* ataupun *SEZs (Special Economic Zones)* di kawasan, yang mana menjadi eskalasi dari kegiatan ekonomi yang nantinya juga akan berimbas kepada kegiatan ekonomi dan aspek HDI di kawasan yang menjadi “panggung” untuk kerja sama ekonomi ini.

Free Trade Agreement atau yang disingkat dengan *FTA* adalah Perjanjian Perdagangan Bebas yang dilakukan dua negara atau lebih untuk menciptakan wilayah bebas perdagangan. Wilayah perdagangan bebas merupakan blok ataupun kelompok kerja sama ekonomi antarnegara yang terletak pada kawasan tertentu. Wilayah perdagangan bebas ini merupakan salah satu bentuk kerja sama ekonomi yang membuat setiap lini kehidupan semakin berkembang termasuk itu ekonomi-perdagangan, tingkat ekonomi komunitas masyarakat yang beraktifitas di

wilayah tersebut serta secara tidak langsung menumbuhkan nilai indeks pertumbuhan manusia di wilayah tersebut. FTA membuat perdagangan barang atau jasa antarnegara dapat melewati perbatasan negara lain tanpa hambatan tarif atau nontarif. Hambatan tarif berkaitan dengan pungutan yang dikenakan pada barang dari suatu negara seperti bea masuk atau *Pajak Dalam Rangka Impor* (PDRI).

Special Economic Zones (SEZs) atau dalam Bahasa Indonesianya Kawasan Ekonomi Khusus, adalah instrumen yang semakin populer untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembuat kebijakan di negara berkembang menerapkan berbagai bentuk KEK untuk mengatalisasi pertumbuhan, termasuk menarik foreign direct investment (World Bank, 2017). Indonesia termasuk dalam negara yang berupaya menggerakkan perekonomian melalui pengembangan KEK. Kawasan ini dibentuk guna meningkatkan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan ekonomi dan geostrategis. KEK diharapkan memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. KEK juga digadang mampu menjadi model terobosan pengembangan kawasan sekaligus meningkatkan lapangan pekerjaan. Terdengar sama saja bukan? Sebenarnya Free Trade dan SEZs ini hamper dikatakan sepenuhnya mirip hanya beberapa hal saja yang membedakannya. DALAM lanskap internasional KEK disebut dengan *Special Economic Zones* (SEZs). SEZs adalah zona yang dirancang untuk menarik perusahaan ke area tertentu, khususnya area yang kurang beruntung secara ekonomi, dengan menawarkan insentif, seperti perlakuan pajak khusus. Manfaat SEZs antara lain

hibah, bantuan memenuhi pinjaman dengan syarat menguntungkan dan perlakuan pajak yang menguntungkan (IBFD, 2015). SEZs telah berkembang menjadi berbagai bentuk dan sering disebut dengan nama yang berbeda di berbagai negara (World Bank, 2017). Namun, secara umum SEZs didefinisikan sebagai wilayah yang ditentukan secara geografis dari suatu negara dengan batas-batas yang jelas dan dimaksudkan untuk kegiatan ekonomi yang ditargetkan secara khusus (Ge, 1999; Hamada, 1974).

Istilah SEZs tergolong baru dan berkaitan dengan World Investment Report 2019. Dalam laporan itu, SEZs didefinisikan “wilayah yang dibatasi secara geografis di mana pemerintah memfasilitasi kegiatan industri melalui pengaturan, insentif fiskal dan dukungan infrastruktur” (UNCTAD, 2019). Sebelum World Investment Report 2019 diterbitkan, sebagian besar karya akademisi dan publikasi lebih umum menggunakan istilah ‘*free trade zone (FTZ)/free zones*’ dan ‘*export processing zones/EPZ*’. Kendati demikian, beberapa publikasi sudah mulai menggunakan istilah SEZs.

Perubahan terminologi tersebut bukan hanya substitusi dari istilah yang serupa. Namun, perubahan tersebut mencerminkan diperlukannya klasifikasi dalam menghadapi istilah yang berbeda dan semakin luas karena menggambarkan fenomena yang semakin kompleks (UNCTAD, 2019).

Hubungan Internasional dewasa ini menjadi disiplin ilmu yang semakin hari semakin rumit dimana adanya ketergantungan yang semakin tinggi, tidak lagi ada pilihan bagi Negara-negara untuk tidak melebarkan sayapnya untuk menjalin

kerja sama internasional dengan tetap berpegang teguh kepada kepentingan nasional negaranya sendiri. Hal ini juga tentu berlaku bagi Indonesia dan Singapura. Secara konseptual, semua hubungan Bilateral antar Negara tentunya memiliki tujuan utama untuk membangun kerja sama ataupun kemitraan yang kuat dengan lingkungan eksternalnya, menciptakan hubungan persahabatan. Inti utama dari pada semua hubungan Bilateral ini ialah mencapai kepentingan nasional baik dari aspek manapun, termasuk ekonomi.

Singapura, Negara tetangg yang sangat acap kali menjadi harapan Indonesia akan bagaimana sebuah proses pembangunan dan pengelolaan hendaknya dijalankan di Negara ini. Mengingat Singapura ada tetangg terdekat, maka dari itu Indonesia dan Singapura haruslah menjadil hubungn erat, harmonis serta produktif dalamartian bahwa kedua Negara ini saling bahu membahu membantu, baiktu itu secara Bilateral maupun untuk kerangka ASEAN. Awalnya hubungan antara Indonesia dan Singapura dimulai dengan rasa saling curiga,ha yang memanglah wajar mengingat kedua Negara tidak mempunyai kesamaan akan aspek historic, kepentingan dan tujuan nasional masing-masing. Namun faktanya hubungan kedua Negara yang bertetangga ini kemudian mengalami perkembangan dan kemajuan yang kondusif sehingga kemudian tumbuhlah hubungan yang dilandaskan atas kesadaran kedua belah pihak tentang adanya sifat saling membutuhkan.

Singapura adalah negara sahabat dan secara fisik geografis merupakan tetangga dekat Indonesia. Oleh karena itu, hubungan dan kerja sama antara kedua negara terwujud dalam berbagai bidang kehidupan, terutama yang menonjol

adalah di bidang ekonomi di mana Singapura adalah mitra dagang utama, sumber investasi asing terbesar, dan juga asal wisatawan asing terbesar bagi Indonesia. Hubungan Bilateral Indonesia Singapura telah menunjukkan peningkatan di berbagai bidang kerjasama terutama hubungan kerjasama politik, hubungan kerjasama ekonomi dan hubungan kerjasama sosial budaya. Selain itu kunjungan antara sesama pejabat Pemerintah maupun swasta di kedua negara telah memberikan kontribusi yang besar bagi pengembangan hubungan kerjasama dan peningkatan investasi di kedua negara. Kedua negara baik Indonesia dan Singapura menyatakan untuk terus bekerjasama dan mempertegas komitmen mereka untuk memperkuat dan memperdalam hubungan Singapura Indonesia. Peningkatan hubungan kerjasama antara Singapura dan Indonesia merupakan peluang kerjasama yang saling menguntungkan. Hubungan kerjasama ekonomi, Indonesia dan Singapura saling melengkapi dan memiliki tingkat yang tinggi. Indonesia memiliki sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang besar sedangkan Singapura memiliki kemampuan pengetahuan dan teknologi tinggi, jaringan ekonomi serta sumber daya keuangan yang besar.

Hubungan Bilateral Indonesia Singapura telah menunjukkan peningkatan di berbagai bidang kerjasama terutama hubungan kerjasama politik, hubungan kerjasama ekonomi dan hubungan kerjasama sosial budaya. Selain itu kunjungan antara sesama pejabat Pemerintah maupun swasta di kedua negara telah memberikan kontribusi yang besar bagi pengembangan hubungan kerjasama dan peningkatan investasi di kedua negara. Kerangka hubungan kerjasama Indonesia dan Singapura tersebut di atas, telah menjadi landasan dasar bagi pengembangan

hubungan Indonesia dan Singapura yang lebih mengikat, salah satunya melalui kunjungan antara Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan kedua negara yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan substansial untuk meningkatkan dan mengembangkan hubungan kerjasama bilateral kedua negara.

Dalam rangka memajukan hubungan kedua Negara, suatu peristiwa penting terjadi melalui kunjungan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Singapura pada tanggal 28 Juli 2015. Ketika itu, Presiden RI telah menyaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia Yuddy Chrisnandi dan Menteri Komunikasi dan Informatika Singapura Yacoob Ibrahim menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) kerjasama dalam bidang e-government di Singapura. Peristiwa itu juga dihadiri oleh PM Singapura Lee Hsien Loong.

Dalam kunjungan, Presiden RI tidak hanya menyaksikan nota kesepahaman MoU antara Indonesia dan Singapura. Tetapi dia juga bertemu perdana dengan PM Singapura Lee Hsien Loong. Dalam pertemuan perdana tersebut, Presiden RI Jokowi membahas detail penanganan/pengelolaan pulau Batam, Kepulauan Riau, dan daerah sekitarnya. Menurut presiden RI Jokowi masalah penanganan Batam, Bintan, Karimun atau disebut Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memang sudah bertahun-tahun tidak berkonsentrasi ke sana. Padahal ada sebuah potensi yang bisa diangkat disana. Dia menjelaskan jika dalam pertemuan nanti akan ada permintaan pengembangan, baik itu dalam sektor industri ataupun pariwisata, maka hal itu diharapkannya dapat direalisasikan iapun menegaskan akan tetap mengedepankan kepentingan nasional dalam

pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yaitu Pulau Batam, Bintan dan Karimun. Artinya, Indonesia harus memiliki daya tawar yang kuat jika ingin serius mengelola daerah kepulauan tersebut.

Kerja Sama Ekonomi Indonesia dan Singapura ini tentu memiliki eskalasi panjang dimana disinilah poin penulis menganggap bahwa dampaknya terhadap aktivitas perekonomian dan aspek Human Development Index sedikit banyaknya akan merasakan dampak-dampak positif yang diharapkan, itulah sebuah eskalasi dari pada kerja sama ekonomi ini.

1.2 Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dapat mengajukan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kerja Sama Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia-Singapura di Kepulauan Riau Berlangsung?
2. Bagaimana Kondisi Perekonomian di Kawasan Ekonomi Khusus Kepulauan Riau?
3. Bagaimana Dampak Kerja Sama Kawasan Ekonomi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kepulauan Riau?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan kajian ini penulis akan membatasi masalah dan memfokuskan masalah agar tidak meluas dan keluar konteks pembahasan. Penelitian ini hanya difokuskan pada kajian Bagaimana Kerja Sama

Kawasan Ekonomi Khusus ini mempengaruhi perekonomian dan Indeks Pembangunan Manusia di Kepulauan Riau dari tahun 2018 hingga tahun 2020

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang penulis lakukan, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

“Bagaimana Dampak Kerja Sama Kawasan Ekonomi Khusus dalam Aspek Perekonomian dan Indeks Pembangunan Manusia di Kepulauan Riau?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan penelitian, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Untuk mengetahui bagaimana kerja sama ekonomi diantara kedua negara ini berlangsung.
- (2) Untuk mengetahui bagaimana kerja sama ekonomi kedua Negara ini mempengaruhi kegiatan ekonomi dan aspek HDI di kawasan Kepulauan Riau.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan Tujuan Penelitian yang sudah penulis paparkan diatas, adapun Kegunaan Penelitian ini, sebagai berikut:

(1) Untuk menambah wawasan pengetahuan terkait berbagai aspek di dalam kerja sama ekonomi internasional, khususnya antara Indonesia dan Singapura, serta dampaknya terhadap aktivitas ekonomi hingga pengaruh terhadap aspek HDI dikawasan Kepulauan Riau.

(2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap disiplin ilmu hubungan internasional.

(3) Untuk menambah pengalaman dan wawasan serta melaksanakan penelitian yang berpedoman pada metode-metode penelitian ilmiah sekaligus dalam rangka implementasi pengetahuan yang diperoleh oleh penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosisal dan Ilmu Politik Universitas Pasundan.